



UNIVERSITAS PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

**SINERGI INSTANSI PENEGAK HUKUM TERHADAP KASUS
ILLEGAL TRANSHIPMENT DI PERAIRAN *NIPA TRANSIT*
ANCHORAGE AREA (NTAA) BATAM GUNA
MEWUJUDKAN KEAMANAN MARITIM**

**NABILAH RIZQIA RAMADHANTY
NIM: 120200302017**

Tesis yang Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
dalam Mendapatkan Gelar Magister Pertahanan

**FAKULTAS KEAMANAN NASIONAL
PROGRAM STUDI KEAMANAN MARITIM**

**BOGOR
2021**



UNIVERSITAS PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

**SINERGI INSTANSI PENEGAK HUKUM TERHADAP KASUS
ILLEGAL TRANSHIPMENT DI PERAIRAN *NIPA TRANSIT*
ANCHORAGE AREA (NTAA) BATAM GUNA
MEWUJUDKAN KEAMANAN MARITIM**

**NABILAH RIZQIA RAMADHANTY
NIM: 120200302017**

Tesis yang Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
dalam Mendapatkan Gelar Magister Pertahanan

**FAKULTAS KEAMANAN NASIONAL
PROGRAM STUDI KEAMANAN MARITIM**

**BOGOR
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : Nabilah Rizqia Ramadhanty
NIM : 120200302017
Program Studi: Keamanan Maritim
Fakultas : Keamanan Nasional
Judul Tesis : Sinergi Instansi Penegak Hukum Terhadap Kasus *Illegal Transshipment* di Perairan *Nipa Transit Anchorage Area* (NTAA) Batam Guna Mewujudkan Keamanan Maritim

Pembimbing I,



Dr. Endro Legowo, S.E.,
M.A.P
Laksamana Pertama TNI
Tanggal: 17 Februari 2022

Pembimbing II,



Dr. M. Adnan Madjid, S.H.,
M.Hum., CIQnR
Laksamana Pertama TNI (Purn.)
Tanggal: 14 Februari 2022





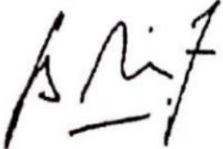
Mengetahui,

Dekan Fakultas Keamanan Nasional,



Dr. Syamsunasir, S.Sos., M.M., C.Fr.A
Marsekal Muda TNI
Tanggal: Februari 2022

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

| <p>Nama : Nabilah Rizqia Ramadhanty NIM : 120200302017 Program Studi: Keamanan Maritim Fakultas : Keamanan Nasional Judul Tesis : Sinergi Instansi Penegak Hukum Terhadap Kasus <i>Illegal Transshipment</i> di Perairan <i>Nipa Transit Anchorage Area</i> (NTAA) Batam Guna Mewujudkan Keamanan Maritim</p> | | | |
|---|--|--|------------------------|
| No. | Nama | Tanda Tangan | Tanggal |
| 1. | Pembimbing I: Dr. Endro Legowo, S.E., M.A.P Laksamana Pertama TNI |  | 17 Februari 2022 |
| 2. | Pembimbing II: Dr. M. Adnan Madjid, S.H., M.Hum., CIQnR Laksamana Pertama TNI (Purn.) |  | 14 Februari 2022 |
| 3. | Penguji I: Dr. Surya Wiranto, S.H., M.H Laksamana Muda TNI (Purn.) |  | 12 Februari 2022 |
| 4. | Penguji II: Dr. Moch. Juriyanto, M.M Laksamana Madya TNI (Purn.) |  | 11 Februari 2022 |
| 5. | Penguji III: Ir. Bayu Asih Yulianto, M.Si |  | 10 Februari 2022 |

PERNYATAAN ORISIONALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya atau bagian karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan jenjang apapun di suatu Perguruan Tinggi; dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat istilah, frasa, kalimat, paragraf, subbab atau bab dari karya yang pernah ditulis atau diterbitkan; kecuali yang secara tertulis diajukan dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Referensi.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiat dalam tesis ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan/undang-undang yang berlaku.

Bogor, 11 Januari 2022



Nabilah Rizqia Ramadhanty

KATA PENGANTAR

Puji Syukur peneliti panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penyusunan tesis dengan judul: “Sinergi Instansi Penegak Hukum Terhadap Kasus *Illegal Transshipment* di Perairan *Nipa Transit Anchorage Area* (NTAA) Batam Guna Mewujudkan Keamanan Maritim” dapat diselesaikan.

Penyusunan tesis ini ditujukan sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Magister pada Program Studi Keamanan Maritim Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan.

Penyusunan tesis ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Laksamana Madya TNI Prof. Dr. Ir. Amarulla Octavian, S.T., M.Sc., DESD selaku Rektor Universitas Pertahanan RI.
2. Marsekal Muda TNI Dr. Syamsunasir, S.Sos., M.M., C.Fr.A selaku Dekan Fakultas Keamanan Nasional.
3. Laksamana Pertama TNI Dr. Endro Legowo, S.E., M.A.P selaku Dosen Pembimbing I.
4. Laksamana Pertama (Purn.) Dr. M. Adnan Madjid, S.H., M.Hum., CIQnR selaku Dosen Pembimbing II.
5. Laksamana Muda TNI (Purn.) Dr. Surya Wiranto, S.H., M.H selaku penguji I, Laksamana Pertama TNI Purwanto, S.E., M.M., M.Si (Han), Kolonel Laut (KH) Dr. Panji Suwarno, S.E., M.Si., CIQnR, Laksamana Madya TNI (Purn.) Dr. Moch. Jurianto, M.M, selaku penguji II, serta Kolonel Laut (KH) Dr. Yusnaldi, S.Ag., M.M., M.Pd dan Ir. Bayu Asih Yulianto, M.Si selaku penguji III.
6. Seluruh dosen Universitas Pertahanan yang memberikan perkuliahan dan ilmu selama menempuh pendidikan magister.

7. Kedua orang tua, adik dan keluarga yang saya cintai, selalu memberikan motivasi dan dukungan spiritual maupun material untuk dapat menyelesaikan tesis dan mendapatkan gelar serta ijazah.
8. Putra Arisandi yang selalu memberikan motivasi dan dukungan dalam hal apapun untuk dapat menyelesaikan tesis dan mendapatkan gelar serta ijazah.
9. Mentor-mentor dan rekan-rekan mahasiswa Universitas Pertahanan Cohort 12 terutama Program Studi Keamanan Maritim Cohort 8.
10. Seluruh Narasumber yang membantu memenuhi keperluan data, lampiran atau referensi dalam penyelesaian tesis saya.
11. Teman-teman, senior dan semua pihak saya yang membantu selama proses penelitian.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan-kebaikan berbagai pihak atas bantuannya.

Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih kurang sempurna, oleh karena itu dengan kerendahan hati mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan tesis ini.

Akhirnya, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat terhadap pengembangan ilmu pertahanan dan bermanfaat bagi *stakeholder* terkait dalam upaya mensinergikan instansi penegak hukum terhadap kasus *illegal transshipment* di perairan *Nipa Transit Anchorage Area* (NTAA) Batam guna mewujudkan keamanan maritim.

Bogor, 11 Januari 2022

Nabilah Rizqia Ramadhanty

ABSTRAK

SINERGI INSTANSI PENEGAK HUKUM TERHADAP KASUS *ILLEGAL TRANSHIPMENT* DI PERAIRAN *NIPA TRANSIT ANCHORAGE AREA* (NTAA) BATAM GUNA MEWUJUDKAN KEAMANAN MARITIM

NABILAH RIZQIA RAMADHANTY

Perairan Nipa sebagai tempat transit kapal internasional untuk kegiatan *anchorage area* sebelum bersandar di Pelabuhan Singapura. Pulau Nipa merupakan salah satu pulau kecil terluar dan kawasan posisi strategis di Indonesia. Secara regional, berada dalam peta kerjasama kawasan IMS GT (Indonesia Malaysia Singapura *Growth Triangle*). Kondisi tersebut membuat perairan rawan dengan kegiatan ilegal. *Illegal transshipment* merupakan salah satu kegiatan ilegal yang akhir-akhir ini sering terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi instansi yang mempunyai kewenangan di laut untuk menjaga keamanan maritim dari kegiatan ilegal. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis sinergi instansi penegak hukum, standar keamanan pelaksanaan pengawasan dan penindakan, serta dukungan kebijakan pemerintah untuk mengatasi *illegal transshipment* di perairan NTAA Batam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data yang didapatkan melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa standar keamanan dilaksanakan secara maksimal namun perlunya jadwal patroli terencana agar mengefisienkan anggaran dan perubahan standarisasi, sistem maupun prosedur untuk ditangani secara efektif. Selanjutnya, dukungan kebijakan oleh pemerintah terdapat beberapa kendala yang dihadapi yaitu keterbatasan personil, alutsista, anggaran, bahan bakar, kemauan, pengetahuan, pengalaman dan keseriusan bekerja personil yang bertanggung jawab. Sinergi dilakukan dengan beberapa cara. Kesimpulan penelitian adalah standar keamanan pelaksanaan pengawasan dan penindakan dilaksanakan secara maksimal dengan beberapa catatan, dukungan kebijakan pemerintah untuk mengatasi *illegal transshipment* dalam bentuk regulasi masing-masing instansi tapi kurang terimplementasikan secara menyeluruh dan sinergi instansi penegak hukum sudah terbilang baik terbukti dengan tidak ditemukan kasus *illegal transshipment*, dan perlu ditingkatkan kembali karena masih terdapat kasus disekitar perairan NTAA yang termasuk perairan Batam.

Kata Kunci: *Illegal Transshipment*, Instansi Penegak Hukum, Keamanan Maritim, Kebijakan, *Nipa Transit Anchorage Area* (NTAA), Sinergi, Standar Keamanan.

ABSTRACT

SYNERGY OF LAW ENFORCEMENT AGENCIES AGAINST ILLEGAL TRANSHIPMENT CASES IN THE WATERS OF NIPA TRANSIT ANCHORAGE AREA (NTAA) BATAM TO REALIZE MARITIME SECURITY

NABILAH RIZQIA RAMADHANTY

The waters of Nipa as an international ship transit point for anchorage activities before leaning on the Port of Singapore. Nipa Island is one of the outermost small islands and strategic position areas in Indonesia. Regionally, it is on the IMS GT (Indonesia Malaysia Singapore Growth Triangle) regional cooperation map. These conditions make the waters vulnerable to illegal activities. Illegal transshipment is one of the illegal activities that have been common in Indonesia lately. Therefore, it takes synergy of agencies that have authority at sea to maintain maritime security from illegal activities. The purposes of this research are to analyze the synergy of law enforcement agencies, security standards for the implementation of surveillance and enforcement, and government policy support to overcome illegal transshipment with a focus on illegal trading in NTAA waters, Batam. This research uses qualitative methods with data sources obtained through interviews, observation, documentation, and literature studies. The results of this research show that safety standards are implemented optimally but the need for a planned patrol schedule in order to streamline budgets and changes in standardization, systems and procedures to be handled effectively. Furthermore, policy support by the government there are several obstacles faced, namely personnel limitations, equipment, budget, fuel, willpower, knowledge, experience and seriousness of working responsible personnel. Synergy is done in several ways. The conclusion of the research is that the safety standards of the implementation of supervision and enforcement are implemented to the maximum with some notes, government policy support to overcome illegal transshipment in the form of regulations of each agency but less implemented thoroughly and the synergy of law enforcement agencies has been fairly well proven by no cases of illegal transshipment, and needs to be improved again because there are still cases around the waters of NTAA which includes the waters of Batam.

Keywords: Illegal Transshipment, Law enforcement agency, Maritime Security, Nipa Transit Anchorage Area (NTAA), Policy, Safety Standards, Synergy.

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| LEMBAR PERSETUJUAN TESIS..... | iii |
| LEMBAR PENGESAHAN TESIS | iv |
| PERNYATAAN ORISINALITAS | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| ABSTRAK..... | viii |
| <i>ABSTRACT</i> | ix |
| DAFTAR ISI..... | x |
| DAFTAR GAMBAR..... | xiii |
| DAFTAR TABEL..... | xiv |
| DAFTAR GRAFIK..... | xv |
| DAFTAR SINGKATAN..... | xvi |
| BAB 1 PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Fokus dan Subfokus Penelitian | 10 |
| 1.3 Rumusan Masalah | 10 |
| 1.4 Tujuan Penelitian | 11 |
| 1.5 Manfaat Penelitian | 11 |
| BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA | 13 |
| 2.1 Landasan Teori..... | 13 |
| 2.1.1 Teori Sinergi..... | 13 |
| 2.1.2 Konsep <i>Maritime Security</i> | 15 |
| 2.1.3 Teori Penegakan Hukum | 20 |
| 2.1.4 Teori Implementasi Kebijakan..... | 24 |
| 2.1.5 Teori Kewenangan | 28 |
| 2.1.6 Teori Otonomi Daerah | 31 |
| 2.2 Hasil Penelitian Terdahulu | 33 |
| 2.3 Kerangka Pemikiran | 43 |
| BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN..... | 44 |
| 3.1 Metode dan Desain Penelitian | 44 |

| | |
|---|----|
| 3.2 Tempat dan Waktu Penelitian | 44 |
| 3.3 Subyek dan Obyek Penelitian | 47 |
| 3.4 Teknik Pengumpulan Data | 49 |
| 3.5 Pemeriksaan Keabsahan Data..... | 49 |
| 3.6 Teknik Analisis Data | 50 |
| BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 53 |
| 4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian..... | 53 |
| 4.1.1 Standar Keamanan Pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan Menghadapi <i>Illegal Transshipment</i> | 53 |
| 4.1.2 Dukungan Kebijakan Pemerintah Untuk Mengatasi <i>Illegal Transshipment</i> | 56 |
| 4.1.3 Sinergi Instansi Penegak Hukum Untuk Mengatasi <i>Illegal</i> <i>Transshipment</i> | 57 |
| 4.2 Hasil Pengumpulan Data | 63 |
| 4.2.1 Standar Keamanan Pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan Menghadapi <i>Illegal Transshipment</i> | 64 |
| 4.2.2 Dukungan Kebijakan Pemerintah Untuk Mengatasi <i>Illegal Transshipment</i> | 69 |
| 4.2.3 Sinergi Instansi Penegak Hukum Terhadap Kasus <i>Illegal</i> <i>Transshipment</i> Di Perairan <i>Nipa Transit Anchorage Area</i> (NTAA) | 70 |
| 4.3 Hasil Pengolahan Data | 72 |
| 4.3.1 Standar Keamanan Pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan Menghadapi <i>Illegal Transshipment</i> | 73 |
| 4.3.2 Dukungan Kebijakan Pemerintah Untuk Mengatasi <i>Illegal Transshipment</i> | 73 |
| 4.3.3 Sinergi Instansi Penegak Hukum Terhadap Kasus <i>Illegal</i> <i>Transshipment</i> Di Perairan <i>Nipa Transit Anchorage Area</i> (NTAA) | 73 |
| 4.4 Hasil Analisis Data | 75 |

| | | |
|-------|--|----|
| 4.4.1 | Standar Keamanan Pelaksanaan Pengawasan Dan Penindakan Menghadapi <i>Illegal Transshipment</i> | 75 |
| 4.4.2 | Dukungan Kebijakan Pemerintah Untuk Mengatasi <i>Illegal Transshipment</i> | 76 |
| 4.4.3 | Sinergi Instansi Penegak Hukum Terhadap Kasus <i>Illegal Transshipment</i> Di Perairan <i>Nipa Transit Anchorage Area</i> (NTAA) | 76 |
| 4.5 | Interpretasi Data | 77 |
| 4.5.1 | Standar Keamanan Pelaksanaan Pengawasan Dan Penindakan Menghadapi <i>Illegal Transshipment</i> | 77 |
| 4.5.2 | Dukungan Kebijakan Pemerintah Untuk Mengatasi <i>Illegal Transshipment</i> | 78 |
| 4.5.3 | Sinergi Instansi Penegak Hukum Terhadap Kasus <i>Illegal Transshipment</i> Di Perairan <i>Nipa Transit Anchorage Area</i> (NTAA) | 78 |
| 4.6 | Pembahasan | 79 |
| 4.6.1 | Standar Keamanan Pelaksanaan Pengawasan Dan Penindakan Menghadapi <i>Illegal Transshipment</i> | 80 |
| 4.6.2 | Dukungan Kebijakan Pemerintah Untuk Mengatasi <i>Illegal Transshipment</i> | 81 |
| 4.6.3 | Sinergi Instansi Penegak Hukum Terhadap Kasus <i>Illegal Transshipment</i> Di Perairan <i>Nipa Transit Anchorage Area</i> (NTAA) | 83 |
| BAB 5 | KESIMPULAN DAN SARAN | 85 |
| 5.1 | Kesimpulan | 85 |
| 5.2 | Saran | 86 |
| | DAFTAR PUSTAKA..... | 88 |
| | LAMPIRAN | 93 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 1. Matriks Keamanan Maritim..... | 15 |
| Gambar 2. Kewenangan Kapal-Kapal Patroli Instansi Pemerintah..... | 29 |
| Gambar 3. Kerangka Berpikir | 43 |
| Gambar 4. Skema Model Analisis Data Interaktif | 51 |
| Gambar 5. Perairan Nipa Transit Anchorage Area..... | 53 |
| Gambar 6. Pulau Nipa | 54 |
| Gambar 7. Skema Kinerja Pengawasan | 64 |
| Gambar 8. Proses Penindakan dan Pasca Penindakan..... | 65 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1. Penelitian Terdahulu | 41 |
| Tabel 2. Waktu Penelitian | 46 |
| Tabel 3. Subyek Penelitian | 47 |
| Tabel 4. Data Penanganan Penyelundupan oleh Ditpolairud | 61 |
| Tabel 5. Pengolahan Data | 74 |

DAFTAR GRAFIK

| | |
|---|----|
| Grafik 1. Resume Penindakan KPU Bea Cukai Batam | 60 |
|---|----|

DAFTAR SINGKATAN

| | |
|-----------------|--|
| ABK | : Anak Buah Kapal |
| AIS | : <i>Automatic Identification System</i> |
| ASEAN | : <i>The Association of Southeast Asian Nations</i> |
| BC | : Bea Cukai |
| BP | : Badan Pengusahaan |
| BBM | : Bahan Bakar Minyak |
| BT | : Bujur Timur |
| BUP | : Badan Usaha Pelabuhan |
| CIQP | : <i>Custom, Immigration, Quarantine, Port Authority</i> |
| Covid-19 | : <i>Corona Virus Disease 2019</i> |
| CSIS | : <i>Centre for Strategic and International Studies</i> |
| DJBC | : Direktorat Jenderal Bea Cukai |
| DPR RI | : Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia |
| ESM | : <i>Electronic Surveillance Measure</i> (alat perang elektronika) |
| ESDM | : Energi dan Sumberdaya Mineral |
| FTZ | : <i>Free Trade Zone</i> /Kawasan Perdagangan Bebas |
| HSC | : <i>High Speed Craft</i> |
| IMO | : <i>International Maritime Organization</i> |
| IMS GT | : <i>Indonesia Malaysia Singapura Growth Triangle</i> |
| ISPS | : <i>International Ship and Port Security</i> |
| KAL | : Kapal Angkatan Laut |
| KBBI | : Kamus Besar Bahasa Indonesia |
| Kepri | : Kepulauan Riau |
| KKP | : Kementerian Kelautan dan Perikanan |
| KM | : Kapal Motor |
| Km ² | : Kilometer persegi |
| KN HUBLA | : Kapal Negara Perhubungan Laut |
| KPLP | : Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai |
| KPU | : Kantor Pelayanan Umum |

| | |
|--------|---|
| KRI | : Kapal Perang Republik Indonesia |
| KSOP | : Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan |
| KUHP | : Kitab Undang-undang Hukum Pidana |
| KUHAP | : Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana |
| LARTAS | : Larangan dan Pembatasan |
| LED | : <i>Light Emitting Diode</i> (Jenis lampu) |
| LOSC | : <i>Law of The Sea</i> |
| LPHP | : Laporan Penentuan Hasil Penindakan |
| LU | : Lintang Utara |
| MDA | : <i>Maritime Domain Awareness</i> |
| NTAA | : <i>Nipa Transit Anchorage Area</i> |
| PBB | : Perserikatan Bangsa-Bangsa |
| PDB | : Produk Domestik Bruto |
| PEN | : Pemulihan Ekonomi Nasional |
| PMK | : Peraturan Menteri Keuangan |
| Polda | : Kepolisian Daerah |
| Polri | : Kepolisian Negara Republik Indonesia |
| PP | : Peraturan Pemerintah |
| PSI | : <i>Proliferation Security Initiative</i> |
| PT | : Perseroan Terbatas |
| SBP | : Surat Bukti Penindakan |
| SDM | : Sumber Daya Manusia |
| SLOC | : <i>Sea Lanes of Communication</i> |
| SOP | : Standar Operasional dan Prosedur |
| TDS | : <i>Target Designation Sight</i> (teropong penunjuk sasaran) |
| TNI AL | : Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut |
| TOC | : <i>Transnational Organized Crime</i> |
| UNCLOS | : <i>United Nations Convention on the Law of the Sea</i> |
| UU | : Undang-undang |
| USD | : <i>United States Dollar</i> |
| ZEE | : Zona Ekonomi Eksklusif |